

Erick Thohir Dicopot dari Menteri BUMN

Dari Halaman 1

(17/9).
Sebelumnya, posisi Menpora sempat kosong selama hampir dua pekan setelah Dito dicopot dalam reshuffle pada Senin (8/9). Melihat la-mana resmi Kemenpora, Erick Thohir menjadi Menpora ke-15.
Menpora pertama dalam kabinet Pemerin-tahan Indonesia dijabat Wikana dalam Kabinet Sjahrir II, III, hingga Kabinet Amir Sjarifudin I dan II. Pada kabinet-kabinet tersebut, Wikana menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pe-muda sejak 1946 sampai 1948.

Bukti Keseriusan Pemerintah

Dari Halaman 1

Institute, Budi Setiawan, menganggap pengangkatan Erick Thohir sebagai Menpora merupakan kabar baik bagi dunia olahraga Indonesia.
Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto adalah bukti perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mendorong kemajuan olah-raga nasional.
Bukan cuma sepakbola, olahraga lain juga berpotensi mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Di sepakbola, Timnas Indone-sia mengalami perkembangan signifikan dan begitu populer di lingkup masyarakat.
"Penunjukan Pak Erick ini ibarat angin segar bagi olahraga Indonesia secara umum, dan secara khusus bagi sepakbola," kata Budi dalam pernyataannya, Rabu (17/9/2025).
"Bukan hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga menjadikan olahraga sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional,"

Angkat Qodari Jadi Kepala KSP

Dari Halaman 1

nan dalam reshuffle kabinet, Rabu (17/9).
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perun-

Menko Yusril: Prabowo Tak Akan Bentuk TGPF

Dari Halaman 1

lah daerah Indonesia.
"Saya sudah mendapat penegasan dari bapak presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan, tim pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusakan akhir Agustus lalu tidak perlu dibentuk," kata Yus-ril di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9).
Yusril mengatakan, saat bertemu dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang diawaki sejumlah tokoh agama dan tokoh bangsa di Istana beberapa waktu lalu, Prabowo menyebut TGPF merupakan usulan yang baik dan perlu dipertim-bangkan.
Namun, sambungnya, akhirnya Prabowo me-negaskan pemerintah tak perlu membentuk TGPF yang diusulkan Sintia Nuriyah Wahid dkk tersebut.
"Tapi tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pemerintah tidak perlu mem-bentuk TPGF itu," ucapnya.

Jaksa Agung Akui Masih Ada Kajari yang

Dari Halaman 1

sambutan dalam peresmian gedung dan fasilitas kantor di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Denpasar, Selasa (16/9) sore.
Burhanuddin mengaku sampai saat ini masih menemukan kajari yang 'oon' atau beloon. Padahal, sambungnya, masih ada yang bahkan di level kepala seksi (kasi) kejaksaan yang pintar.
"Sampai sekarang pun, saya pernah menemukan sesuatu Kajari yang masih 'oon' gitu loh. Mohon maaf, masih ada Kejari, Kasi-kasi yang pintar, kan dipaksakan gitu, karena sudah pangkat yang 4A," ungkapnya.
"Mungkin, saudaranya siapa, atau temannya siapa, iya dipaksakan jadi Kajari. Saya enggak akan mau lagi yang gitu, yang saya mau adalah yang betul-betul berprestasi, punya otak. Mohon maaf, saya agak kasar sedikit," sindir Burhanud-din.

Bupati Deliserdang Bicara Kemacetan Tembung

Dari Halaman 1

kan, jalan sempit dibiarkan, dan kini warisan itu berbuah kemacetan.
Namun ia juga membawa harapan. Ada 522 kilometer jalan utama yang sedang dimaksimal-kan kondisinya. Ada rencana membuka jalan alternatif agar beban kendaraan tak bertumpuk di satu titik. Bahkan Pasar Gambir, yang selama ini menjadi biang keruwetan, tengah dirancang ulang melalui koordinasi dengan PTPN.

Bobby Sampaikan Ranperda P-APBD 2025

Dari Halaman 1

Rp12,543 Triliun. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas asumsi sumber pendapatan pajak daerah, dengan pertimbangan potensi pajak daerah yang dapat dicapai, serta mempedomani ketentuan dari pemerintah pusat.
"Dalam penyesuaian anggaran, kita meng-hadapi berbagai dinamika, baik secara regional maupun nasional. Perubahan asumsi ekonomi, fluktuasi harga komoditas, pergeseran prioritas pembangunan, serta kebutuhan mendesak di sek-tor pelayanan publik menjadi alasan kuat perlunya penyesuaian anggaran," ujar Gubernur Bobby

Jabatan menteri ini dihapus sejak 1949 hingga 1964. Menpora kembali hadir dalam Kabinet Dwikora I yang dijabat Maladi sebagai Menteri Olah Raga pada Agustus 1964 hingga Februari 1966.
Setelah itu 'Menpora' kembali menghilang. Presiden Soeharto kembali mengadakan posisi untuk urusan pemuda dalam Kabinet Pemb-an-gunan III yang diisi Abdul Gafur sejak Maret 1978 hingga 1983.
Dalam Kabinet Pembangunan IV, Abdul Gafur menjabat sebagai Menteri Negara Pe-muda dan Olahraga, dari Maret 1983 hingga Maret 1988.
Pada Kabinet Pembangunan V, urusan pe-

ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa Pres-iden Prabowo tentu melihat rekam jejak Erick yang punya banyak pengalaman di bidang olah-raga. Selama beberapa periode pemerintahan, kata dia, Menpora selalu diisi oleh orang yang tidak memahami seluk-beluk dunia olahraga.
"Pak Erick dia pernah terlibat di basket, menjabat Ketua Komite Olimpiade Indonesia, hingga dipercaya menjadi anggota IOC. Selama ini hampir tidak ada Menpora yang punya pen-galaman sedalam itu," tutur Budi.
Budi optimistis Erick mampu memperbaiki sistem keolahragaan Indonesia, mulai dari pembinaan atlet hingga peningkatan prestasi. Menurutnya, banyak cabang olahraga yang pu-nya potensi besar di level internasional, namun kurang mendapat perhatian serius.
"Kegagalan sistem yang terjadi selama ini, saya yakin bisa diatasi Pak Erick dengan pengalaman yang ia miliki. Pak Prabowo pasti mempertimbangkan hal itu," ucap Budi.

dangan dengan seluruh-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika dan jabatan bekerja sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," kata Prabowo mengucap sumpah diikuti para

Pada kesempatan itu, Yusril mengatakan saat ini sudah ada tim independen yang dibentuk ber-sama enam lembaga negara terkait HAM (Komnas HAM dkk) untuk mencari fakta terkait peristiwa demo tersebut. Dia bilang, Prabowo mempersila-kan Komnas HAM bersama dengan lima lembaga HAM lainnya untuk bekerja melakukan penye-lidikan mencari fakta tentang apa yang terjadi di balik peristiwa kekerasan saat gelombang demo Agustus lalu.
"Jadi persoalan ini sudah jelas sekiranya hari ini. Kalau ada yang menanyakan apa perlu dibe-n-tuk atau tidak, presiden mengatakan tidak perlu dibentuk," ucap Yusril.
Wacana pembentukan tim investigasi indepen-d-en itu mencuat usai Prabowo berdialog dengan tokoh GNB di Istana beberapa waktu lalu.
Anggota GNB sekaligus eks Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa salah satu aspirasi utama GNB ialah pembentu-kan tim investigasi independen untuk mengust kericuhan demo pada 25 Agustus serta 28-30

Burhanuddin menegaskan institusi adhyaksa itu tak butuh kajari yang beloon, dan 'hanya tahu soal uang'. Dia menegaskan Kejagung sedang mem-bangun institusi yang dipenuhi orang pintar dan berprestasi.
"Tapi kenyataannya begitu, sudah 'oon', enggak ngerti apa-apa, yang ngerti duit saja. Kita sedang membangun bank talent, yang kita mengharpkan bank ini bisa memenuhi keinginan teman-teman," ujarnya.
"Saya juga tidak menginginkan dan saya tidak memutasi orang yang mengenal saya. Mengenal saya pun untuk apa? kalau 'oon' atau beloon. Saya tidak akan memberikan kesempatan, yang saya berikan kesempatan adalah betul-betul manusia ad-hyaksa yang pintar punya integritas," ungkapnya.
Atas dasar itu dia berpesan kepada semua Kejati untuk mengusulkan calon pemimpin yang berprestasi di kejari, bukan hanya kedekatan atau kekerabatan saja.

Langkah-langkah itu tentu patut diapre-siasi. Tidak semua pemimpin mau datang dan mengakui persoalan di hadapan media. Tidak semua pula mau berbicara terus terang tentang keterbatasan masa lalu dan rencana ke depan.
Meski demikian, warga Tembung tentu men-unggu bukti nyata. Sebab macet bukan hanya wacana, melainkan kenyataan sehari-hari yang melelahkan. Jalan sempit, pasar semrawut, dan drainase mampet adalah pemandangan yang setiap hari mereka hadapi.
Kehadiran Bupati di meja redaksi memberi

Nasution pada rapat paripurna tersebut.

Dijelaskan Bobby, penyusunan anggaran ini juga untuk peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta penanganan masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. "Semua hal tersebut menuntut kita untuk lebih responsif dalam mengelola keuangan daerah," katanya.
Menurutnya, Perubahan APBD juga dilak-sanakan sebagai bentuk penyesuaian atas dina-mika pembangunan daerah, baik karena adanya perkembangan asumsi ekonomi makro, realisasi pendapatan dan belanja daerah pada semester per-tama. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan,

muda dan olahraga digabung ke dalam Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat Akbar Tanjung pada Maret 1987 hingga Maret 1993.
Presiden Abdurrahman Wahid menghapus posisi Menpora pada perombakan Kabinet Persatuan Nasional, 2000 silam. Hal serupa dilakukan Megawati Sukarnoputri saat jadi Presiden.
Pada 2004, Presiden Susilo Bambang Yud-hoyono kembali mengadakan posisi Menpora. Status Menpora ditingkatkan dari menteri ne-gara ke menteri departemen atau kementerian. Posisi Menpora tetap ada hingga saat ini dijabat Erick Thohir.(**cnni/js**)

Terkait rangkap jabatan Erick sebagai Ketua Umum PSSI, Budi menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar, baik berdasarkan undang-und-gang maupun statuta FIFA.
"Undang-undang tidak melarang menteri menjabat ketua umum cabang olahraga. Statuta FIFA terbaru juga tidak mengatur larangan itu. Di banyak negara lain, bahkan anggota keluarga kerajaan ada yang memimpin federasi sepak bola," tuturnya.
Selain itu, Budi menyoroti perlakuan tidak adil yang kerap diterima Indonesia dari AFC dalam berbagai turnamen, termasuk kualifikasi Piala Dunia. Kasus terbaru adalah penunjukan wasit asal Kuwait untuk pertandingan Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
"Kalau Erick menjabat Menpora, saya yakin AFC akan melihatnya bukan sekadar sebagai Ketua PSSI, melainkan simbol negara yang ada kaitannya dengan hubungan diplomasi antar-bangsa," katanya lagi.(**det/js**)

menteri dan kepala badan yang dilantik.
Keputusan Presiden RI Nomor xx Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029 pada 17 Sep-tember 2025.

Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota lain-nya.
"Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyam-paikan bagaimana formatnya," ujar Lukman usai pertemuan di Istana, Jakarta, Kamis (11/9).
Ia menegaskan komisi independen diperlukan agar unjuk rasa damai yang dilakukan koalisi masyarakat sipil, termasuk aktivis, mahasiswa, dan pelajar, tidak didiskreditkan dengan tuduhan sebagai penyebab kerusakan.
"Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilang-kan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi," kata Lukman.
"Aspirasi GNB adalah perlunya dibentuk Komisi Investigasi Independen terkait dengan kejadian prahara Agustus beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan jumlah korban jiwa, kor-ban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu," imbuhnya.(**cnni/js**)

"Saya selalu meminta seluruh Kejati sebe-narnya. Kalau mengusulkan orang, tolonglah lihat dulu. Ini pak, ini pak. Padahal cuma kenal dekat saja, saya tidak mau. 'Pak anak ini berprestasi tolong'. Enggak ini, setiap Kajati mau pindah, puluhan orang diusulkan, artinya Itu bukan karena prestasi tapi ewuh pakewuh, enggak enak kalau enggak diusulkan permintaannya. Nah kalau se-mua pimpinan masih berpikiran begitu, iya hancur kejaksaan," ujarnya.
Ia menyebutkan fokus utama dirinya saat mem-impin Kejagung adalah pembenahan dan pening-katan sumber daya manusia. Sebab, menurutnya, banyak jaksa yang seharusnya berprestasi dan pintar itu talentanya malah tenggelam karena tidak diberikan kesempatan.
"Banyak teman-teman yang tenggelam, kasi-han. Padahal mereka pintar, punya talenta tapi tenggelam karena usianya dan tidak diberi kesem-patan untuk berprestasi," jelasnya.(**cnni/js**)

isyarat baik bahwa masalah ini diakui dan dicari jalan keluarnya. Semoga dari pengakuan itu lahir langkah-langkah konkret. Sebab bagi rakyat, kemacetan bukan sekadar topik diskusi, melainkan soal waktu, tenaga, dan hidup yang terbuang di jalan.
Islam mengajarkan bahwa setiap kesulitan pasti disertai jalan keluar. Fa inna ma‘ al ‘usri yusrā, inna ma‘ al ‘usri yusrā. Maka, bila ikhtiar dilakukan dengan sungguh-sungguh dan aman-ah, kita percaya bahwa jalan Tembung yang sempit pun kelak bisa terbuka lebih lapang.(*)

memperkuat perekonomian daerah, serta mening-katkan kesejahteraan masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih dan apre-siasi yang tinggi kepada dewan yang terhormat atas atensi yang telah diberikan beberapa hari ini dalam melaksanakan tahapan proses penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang pem-bahasannya dilakukan secara maraton namun tetap intensif," katanya.
Hadir dalam rapat paripurna ini antara lain Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, pimpinan dan anggota DPRD Sumut, Wakil Gubernur Sumut Surya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Togap Simangunsong, OPD Sumut serta lainnya.(**A-05**)

MK Tolak Uji

Dari Halaman 1

dengan Pemohon IV untuk seluruhnya , " ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/9).
Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh menuturkan UU 34/2004 telah terdaftar dan tercantum berulang kali di Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan setidaknya terdaftar dua kali sebagai Prolegnas Prioritas.
RUU perubahan atas UU 34/2004 telah dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025, di mana hal terse-but sangat berkaitan erat dengan kebijakan politik hukum dari pembentuk Undang-undang yang menyatakan ada di-namika kompleksitas tantangan pertahanan dan keamanan negara sehingga menciptakan urgensi nasional.
Daniel bilang hal demikian masih sejalan dengan haki-kat dan tujuan dari tugas Badan Legislasi dalam memberi-kan pertimbangan terkait suatu UU dimasukkan dalam Prolegnas perubahan.
Artinya, persetujuan yang disepakati oleh DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 18 Desember 2025 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, secara substansial telah mewakili representasi dimaksud yang dapat dimaknai se-bagai bentuk kesepakatan DPR untuk memasukkan RUU perubahan atas UU 34/2004 ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025.
"Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Para Pemohon berkenaan perencanaan revisi UU TNI dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dilakukan secara melanggar prosedur sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat 3, Pasal 20, dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945, UU P3, dan Tatib DPR 1/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum," kata Daniel.
Sementara itu, Hakim MK M Guntur Hamzah menga-takan berdasarkan fakta yang diperoleh MK, pembentuk Undang-undang disebut telah melakukan upaya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemba-hasan UU 3/2025.
"Sejalan dengan itu, pembentuk Undang-undang juga melakukan upaya baik melalui tatap muka dalam berbagai diskusi publik maupun melalui metode berbagi informasi secara elektronik melalui laman resmi maupun kanal You-Tube yang dapat diakses oleh masyarakat yang membu-tuhkan terutama para pemangku kepentingan yang hendak menggunakan haknya untuk berpartisipasi," ucap Guntur.
Putusan ini diwarnai pendapat berbeda atau dissenting opinion dari empat orang hakim konstitusi yakni Suhar-toyo, Saldi Isra, Enny Nurbainingsih dan Arsul Sani.
Mereka berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga MK seharusnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian.
Sebelumnya, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan sempat meminta MK untuk menjatuhkan putu-san sela dalam perkara uji formil UU TNI. (**cnni/js**)



Manuver Politik atau Regenerasi Pemuda?

Dari Halaman 1

salah satu portofolio paling strategis dalam kabinet. Di dalamnya terdapat ratusan perusahaan negara dengan aset ribuan triliun, peran vital dalam ekonomi nasional, serta daya tawar politik yang tinggi. Jabatan ini kerap menjadi sorotan publik dan perebutan pengaruh.
Ketika Erick Thohir digeser ke Menpora, publik spon-tan membaca bahwa ini merupakan penurunan panggung politik baginya. Dari kementerian “raksasa” ke kemen-terian yang lebih kecil, dari pusat kekuasaan ekonomi ke ranah kepemudaan dan olahraga yang sering dianggap pinggiran. Banyak pihak bertanya, mengapa sosok dengan kinerja cukup menonjol di BUMN justru dialihkan ke Menpora?
Jawabannya bisa bermacam-macam. Pertama, bisa jadi ini manuver politik Presiden Prabowo untuk menata keseimbangan kekuasaan di kabinet. Kedua, langkah ini bisa pula ditafsirkan sebagai upaya menempatkan Erick di pos yang lebih sesuai dengan rekam jejaknya di dunia olahraga. Bagaimanapun, Erick pernah sukses memimpin INASGOC Asian Games 2018 dan kini menjabat Ketua Umum PSSI.
Jika menoleh ke belakang, posisi Menpora memang tidak pernah konsisten dalam struktur pemerintahan Indo-nesia. Jabatan ini beberapa kali dihapus dan dihidupkan kembali, tergantung arah politik presiden. Pada masa ter-tentu, urusan pemuda dan olahraga digabung ke kemen-terian lain, bahkan pernah berada di bawah Mendikbud. Baru sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, posisi Menpora kembali berdiri sebagai kementerian penuh hingga saat ini.
Sejarah ini menunjukkan bahwa urusan pemuda dan olahraga belum selalu dipandang strategis dalam peru-musan kebijakan nasional. Ia lebih sering menjadi ruang akomodasi politik ketimbang prioritas pembangunan jangka panjang. Pergeseran Erick Thohir ke kursi Menpo-ra memperlihatkan pola yang sama: kementerian ini tetap digunakan sebagai arena manuver politik, meski di sisi lain dibebani ekspektasi besar.
Meski demikian, publik tak bisa menutup mata bahwa Kemenpora memiliki agenda besar. Dunia olahraga tengah menghadapi tantangan pembinaan atlet jelang Olimpiade, tata kelola sepak bola yang masih diliputi krisis, hingga pembangunan sarana olahraga yang belum merata. Sementara itu, sektor kepemudaan menghadapi isu radikalisme, pengangguran, hingga literasi digital yang rendah.
Dalam konteks inilah, Erick Thohir berpeluang mem-bawa energi baru. Gaya manajerial korporasi yang ia terapkan di BUMN bisa diadaptasi untuk membenahi tata kelola olahraga. Kedekatannya dengan dunia bisnis dan internasionalisasi olahraga juga bisa membuka jalan baru bagi diplomasi pemuda Indonesia di tingkat global.
Namun, peluang ini hanya bisa terwujud jika ia sung-guh-sungguh memandang Menpora sebagai pos strategis, bukan sekadar “tempat singgah” politik.
Pergeseran Erick Thohir dari BUMN ke Menpora pada akhirnya bisa dibaca dalam dua cara. Pertama, sebagai manuver politik Presiden Prabowo untuk merombak peta kekuasaan di kabinet. Kedua, sebagai momentum regen-erasi pemuda dan pembenahan olahraga nasional.
Mana tafsir yang lebih tepat? Waktu yang akan men-jawabnya. Namun, satu hal pasti: pemuda dan olahraga tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan pinggiran. Di tangan Erick Thohir, Kemenpora bisa menjadi lebih dari sekadar posisi kabinet yang kerap dipakai untuk ako-modasi politik. Ia bisa menjelma menjadi motor pem-bangunan karakter bangsa, bila dikelola dengan visi dan keberanian yang sama seperti saat ia mengelola BUMN.